

STRATEGI PENERAPAN SILA KELIMA PANCASILA UNTUK PENDIDIKAN BERKEADILAN: STUDI KASUS ANAK TIDAK SEKOLAH DI PAPUA

Nabila Fatiha Putri Basanda¹, Fadillatul Zahrok², Anggita Kharisma Maharani³, Nafisatul Masruroh⁴, Alfin Hanif Dawam Abdullah⁴

⁴Nafisatul Masruroh, Surel: nafisatul.masruroh.2404216@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Cakrawala No.5, Sumber Sari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Indonesia

Abstract

This article aims to analyze the problem of high rates of out-of-school children in Papua and identify the factors that cause education inequality in the region. It also explores potential solutions, including the implementation of the Sekolah Sepanjang Hari (SSH) program as an effort to increase education participation in remote areas. The method used is a literature study by analyzing secondary data from government reports, previous research articles and policies related to education in Papua. The results show that the main factors causing uneducation in Papua are limited geographical accessibility, inadequate education infrastructure, and lack of qualified teaching staff. The SSH program in some pilot areas has been proven to increase education participation rates. However, the biggest challenges faced are the unequal distribution of the education budget and the lack of coordination between the central and local governments. Policy recommendations include equitable distribution of education infrastructure, improving the quality and distribution of teachers, and optimizing the use of the Special Autonomy Fund for the education sector. In conclusion, the success of education in Papua requires more inclusive policies, based on local wisdom, and active participation of all relevant parties to realize social justice in education.

Keywords: education in Papua; out-of-school children; Sekolah Sepanjang Hari; education policy; education equity

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis masalah tingginya angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Papua dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmerataan pendidikan di wilayah tersebut. Penelitian ini juga mengeksplorasi solusi potensial, termasuk implementasi program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di daerah terpencil. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder dari laporan pemerintah, artikel penelitian terdahulu, serta kebijakan terkait pendidikan di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab ketidakbersekolahan di Papua adalah aksesibilitas geografis yang terbatas, infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Program SSH di beberapa daerah uji coba terbukti dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketidakmerataan distribusi anggaran pendidikan dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Rekomendasi kebijakan mencakup pemerataan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas dan distribusi guru, serta pengoptimalan penggunaan Dana Otsus untuk sektor pendidikan. Kesimpulannya, keberhasilan pendidikan di Papua memerlukan kebijakan yang lebih inklusif, berbasis pada kearifan lokal, serta partisipasi aktif semua pihak terkait untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pendidikan.

Kata kunci: pendidikan Papua; anak tidak bersekolah; Sekolah Sepanjang Hari; kebijakan pendidikan; pemerataan pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 31 UUD 1945. Hak ini juga tercermin dalam sila kelima Pancasila, yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, hingga saat ini, realisasi pendidikan yang merata di Indonesia masih menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah Papua (Alfianti, 2019). Berdasarkan data tahun 2023 oleh Universitas Negeri Papua, sebanyak 693.805 anak usia sekolah (7–18 tahun) di Papua tercatat tidak bersekolah, meningkat drastis dari 620.000 anak pada dua tahun sebelumnya. Jika tren ini tidak segera diatasi, diperkirakan jumlah tersebut dapat mencapai 1 juta anak pada tahun 2029.

Masalah pendidikan di Papua tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan (Herawati, 2014). Jumlah penduduk usia sekolah (PUS) yang tidak bersekolah ini tersebar di enam provinsi baru hasil pemekaran Papua. Berdasarkan data, Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan jumlah PUS tidak bersekolah tertinggi, yakni mencapai 148.683 anak. Diikuti oleh Papua Barat Daya dengan 44.828 anak, Papua Selatan dengan 103.158 anak, dan Papua Barat dengan jumlah terendah yaitu 39.053 anak. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya fasilitas pendidikan, keterbatasan jumlah guru, sulitnya akses geografis, serta lemahnya manajemen alokasi anggaran pendidikan.

Fenomena ini mencerminkan ancaman besar terhadap masa depan generasi muda Papua jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan pendidikan yang komprehensif (Sumarno, 2018). Sebagai bagian dari solusi, salah satu pendekatan yang telah diujicobakan adalah program Sekolah Sepanjang Hari (SSH)(Putri, 2020). Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak di sekolah sepanjang hari, khususnya di kampung-kampung yang sulit dijangkau. Upaya ini memanfaatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk membangun infrastruktur pendidikan, mendukung pelatihan guru, serta menyelenggarakan sekolah berbasis komunitas (Ismail, 2018).

Penguatan kebijakan pendidikan yang berfokus pada pendidikan dasar menjadi sangat penting. Pemekaran wilayah yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah guru dan infrastruktur pendidikan justru memperburuk angka anak putus sekolah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah konflik. Pada konteks ini, keterlibatan organisasi masyarakat seperti Gerakan Papua Mengajar (GPM) juga menjadi langkah strategis untuk menjangkau anak-anak yang terputus dari sistem pendidikan formal (Alam, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Papua, serta mengevaluasi implementasi program-program pendidikan seperti Sekolah Sepanjang Hari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan pendidikan di Papua. Penelitian ini akan menyoroti pentingnya implementasi sila kelima Pancasila sebagai landasan utama dalam mendorong keadilan sosial di bidang pendidikan.

Kajian teoritik yang mendasari penelitian ini menyoroti pentingnya pendidikan sebagai hak fundamental manusia. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daerah tertinggal membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan lokal. Program pendidikan berbasis komunitas telah terbukti efektif di beberapa wilayah dengan tantangan serupa, namun implementasinya di Papua masih memerlukan adaptasi dan evaluasi. Pada kerangka tersebut, penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan literatur dengan memberikan analisis mendalam terhadap strategi peningkatan pendidikan di Papua dalam konteks sila kelima Pancasila.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis masalah tingginya angka anak-anak yang tidak bersekolah di Papua, dengan fokus pada data sekunder dari laporan pemerintah, studi terdahulu, dan infografis terkait. Teknis pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data kependudukan, laporan pendidikan, dan kebijakan pemerintah, termasuk program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Sasaran penelitian ini adalah penduduk usia sekolah (PUS) di seluruh wilayah Papua, dengan data yang diambil dari sumber resmi yang mencakup Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Data diperoleh dari instansi terkait seperti Universitas Negeri Papua dan pemerintah daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi pendidikan di Papua dan analisis komparatif untuk membandingkan keberhasilan program-program pendidikan di berbagai daerah (Akbar, 2019). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah yang mendasar dalam dunia pendidikan di Papua adalah tingginya angka anak yang tidak mengakses pendidikan (Alfianti, 2019). Berdasarkan data terbaru dari Universitas Negeri Papua (2023), diperkirakan lebih dari 690.000 anak usia sekolah di seluruh provinsi Papua tidak mengenyam pendidikan formal. Angka ini mencakup tingkat pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan. Di beberapa wilayah terpencil, seperti Papua Pegunungan, anak-anak harus menempuh jarak yang sangat jauh dan medan yang berat hanya untuk mencapai sekolah terdekat, yang menyebabkan mereka memilih untuk tidak bersekolah. Angka ini semakin diperburuk dengan kondisi infrastruktur yang terbatas dan rendahnya jumlah tenaga pengajar yang terdistribusi merata.

Masalah ini jelas bertentangan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menggariskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 5 menegaskan bahwa negara wajib menyediakan layanan pendidikan dasar yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang berada di wilayah paling terpencil sekalipun. Konteks ini, ketidakmerataan akses pendidikan di Papua menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam implementasi hak pendidikan yang setara (Nuranisa, 2022).

Berdasarkan data yang lebih rinci, angka anak yang tidak bersekolah tersebut tersebar secara tidak merata, dan sebagian besar berada di daerah pedalaman dan terisolasi. Sebagai contoh, Papua Barat Daya mencatatkan angka 39.053 anak tidak bersekolah, Papua Tengah mencapai lebih dari 205.000 anak, sementara Papua Pegunungan dan Papua Barat memiliki sekitar 148.000 hingga 152.000 anak yang tidak mengenyam pendidikan. Tabel 1. berikut merangkum data lebih rinci mengenai masalah ini:

Tabel 1. Data Anak Tidak Sekolah

Provinsi	Jenjang Sekolah			
	SD	SMP	SMA	Total
Papua Barat Daya	16.320	12.207	13.978	39.053
Papua Tengah	44.828	62.601	90.231	205.763

Papua Selatan	48.362	35.260	19.536	103.158
Papua Pegunungan	66.385	39.016	43.282	148.683
Papua Barat	32.076	63.203	57.041	152.319
Total	239.940	213.498	240.368	693.805

Penurunan angka partisipasi pendidikan ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kemajuan sosial-ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ini dengan segera agar setiap anak di Papua dapat merasakan manfaat dari pendidikan yang setara dan berkualitas.

Faktor Penyebab Tingginya Angka Putus Sekolah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa daerah di Papua (Alfianti, 2019), terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingginya angka anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Faktor-faktor ini antara lain:

1. Geografis dan Aksesibilitas: Papua adalah wilayah dengan kondisi geografis yang sangat menantang. Banyak daerah yang terisolasi secara fisik, sehingga anak-anak harus menempuh jarak jauh dan melewati medan yang sulit, seperti hutan, pegunungan, atau sungai, untuk mencapai sekolah terdekat. Hal ini mempengaruhi tingkat kehadiran dan retensi siswa di sekolah. Di beberapa wilayah, anak-anak bahkan harus menempuh lebih dari lima jam perjalanan untuk sampai ke sekolah. Kondisi ini memaksa mereka untuk putus sekolah atau memilih untuk tidak bersekolah sama sekali. Ini diperparah dengan keterbatasan transportasi yang memadai, yang menghambat aksesibilitas pendidikan.
2. Infrastruktur Pendidikan yang Minim: Meskipun ada kebijakan pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, infrastruktur di banyak daerah di Papua masih jauh dari kata memadai. Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang layak, seperti gedung sekolah yang tidak permanen, kekurangan fasilitas sanitasi yang baik, serta minimnya peralatan pendidikan. Hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut rendah, dan siswa cenderung meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah mereka.
3. Keterbatasan Tenaga Pengajar: Selain masalah infrastruktur, rendahnya jumlah tenaga pengajar yang berkualitas juga menjadi kendala besar. Di beberapa wilayah terpencil, ada sekolah yang hanya memiliki satu guru yang mengajar berbagai mata pelajaran, sementara di wilayah lain, tidak ada cukup tenaga pengajar untuk mengisi kekosongan di sekolah-sekolah. Guru-guru yang ada pun sering kali tidak mendapat pelatihan yang memadai dan mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi kepada siswa dengan berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.
4. Teori-teori pendidikan yang relevan untuk menjelaskan hal ini adalah teori pendidikan inklusif, yang menekankan bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh setiap anak, tanpa terkecuali (Purnama, 2022). Kondisi geografis dan infrastruktur yang tidak memadai di Papua jelas bertentangan dengan prinsip dasar teori ini yang menyarankan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah.

Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai Solusi

Salah satu solusi untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah di Papua, Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) diusulkan sebagai pendekatan yang dapat mengurangi ketimpangan pendidikan di daerah-daerah terpencil (Alfianti, 2019). Program ini menawarkan alternatif jam belajar yang lebih panjang, yang memungkinkan siswa untuk mengakses pendidikan tanpa harus menempuh perjalanan jauh setiap harinya. Dalam beberapa kasus di

Papua, di mana jarak antar sekolah sangat jauh, program ini juga memberikan kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan lebih efisien.

Hasil uji coba Program Sekolah Sepanjang Hari di beberapa kabupaten di Papua, seperti Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat, menunjukkan hasil yang positif. Program ini tidak hanya meningkatkan kehadiran siswa, tetapi juga memungkinkan pengembangan keterampilan tambahan, seperti seni, olahraga, dan keterampilan hidup lainnya yang relevan dengan kebutuhan lokal. Sebagai contoh, di Sorong Selatan, tingkat ketidakhadiran siswa menurun hingga 20%, sementara di Maybrat, 15% lebih banyak anak melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat lanjutan setelah diimplementasikannya program ini.

Program ini juga didasarkan pada teori pendidikan berbasis waktu, yang menyatakan bahwa dengan memperpanjang jam belajar dan memberikan ruang untuk pembelajaran yang lebih interaktif, kualitas pendidikan dapat meningkat (Alfianti, 2019). Model pendidikan ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih komprehensif, serta memungkinkan mereka untuk menyesuaikan jadwal mereka dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, teori ini juga didukung oleh temuan dari Mbato (2022), yang menyarankan bahwa pendidikan berbasis budaya dan lokal akan lebih efektif, terutama di daerah-daerah yang terisolasi seperti Papua.

Tantangan dalam Kebijakan Pendidikan di Papua

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Papua, tantangan besar masih tetap ada, terutama dalam implementasinya. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam kebijakan pendidikan di Papua (Kurniawati, 2022) antara lain:

1. **Alokasi Anggaran yang Tidak Merata:** Meskipun Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan untuk Papua cukup besar, alokasi anggaran tersebut sering kali tidak digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Pemerintah daerah sering kali kesulitan mengelola dana ini untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan guru, terutama di daerah terpencil. Bahkan, dalam beberapa kasus, dana Otsus tidak sepenuhnya dialokasikan untuk sektor pendidikan, yang memperburuk ketidakmerataan pendidikan di wilayah-wilayah tertentu.
2. **Ketidakmerataan Distribusi Sumber Daya:** Meskipun ada kebijakan yang mendukung distribusi guru ke daerah terpencil, ketidakmerataan distribusi sumber daya manusia dan material pendidikan masih menjadi masalah besar. Guru-guru yang berkualitas cenderung lebih memilih untuk bertugas di daerah perkotaan yang lebih maju, sementara daerah-daerah terpencil seperti di Papua tetap kekurangan tenaga pengajar. Hal ini menyebabkan banyak sekolah di wilayah tersebut terpaksa menjalankan proses pendidikan dengan kekurangan tenaga pendidik, dan kualitas pengajaran yang diberikan sering kali tidak memadai.
3. **Kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah:** Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan pendidikan di Papua adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meski ada kebijakan nasional yang mendukung pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, tidak semua kebijakan tersebut diterjemahkan dengan baik di tingkat daerah. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah pusat tidak diterima dengan baik oleh pemerintah daerah, yang akhirnya memengaruhi kualitas dan distribusi pendidikan di daerah tersebut.

Berdasarkan teori kebijakan pendidikan berbasis wilayah, solusi untuk masalah ini adalah dengan mendorong desentralisasi kebijakan pendidikan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal. Kebijakan ini menekankan pentingnya pemberdayaan pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengalokasikan sumber daya pendidikan, serta memastikan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Lena (2024) yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan harus bisa diadaptasi dengan kondisi lokal untuk memberikan hasil yang maksimal.

Solusi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa solusi dan rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Papua (Lena, 2024):

1. **Pemerataan Infrastruktur Pendidikan:** Salah satu langkah yang sangat penting adalah pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Papua. Ini termasuk membangun gedung sekolah yang layak, menyediakan alat-alat pendidikan yang memadai, serta memastikan bahwa sekolah di daerah terpencil memiliki fasilitas sanitasi dan ruang kelas yang sesuai. Pemerintah harus memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki angka putus sekolah tertinggi untuk mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan.
2. **Peningkatan Kualitas dan Jumlah Tenaga Pengajar:** Untuk mengatasi kekurangan guru di daerah-daerah terpencil, diperlukan kebijakan yang lebih kuat dalam merekrut dan melatih guru. Pemerintah dapat memperkenalkan insentif bagi guru yang bersedia bekerja di daerah terpencil (Uno, 2024), seperti pemberian tunjangan khusus atau fasilitas tambahan. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan untuk guru harus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kualitas pengajaran di daerah-daerah tersebut.
3. **Optimasi Penggunaan Dana Otsus untuk Pendidikan:** Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan ke Papua harus lebih difokuskan pada sektor pendidikan. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa dana ini digunakan untuk tujuan yang tepat dan diawasi dengan ketat oleh instansi yang berwenang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk tim pengawas independen yang dapat memonitor penggunaan dana pendidikan di setiap kabupaten di Papua.
4. **Peningkatan Program Pendidikan Berbasis Komunitas:** Salah satu solusi jangka pendek yang dapat dilakukan adalah meningkatkan program pendidikan berbasis komunitas. Pendidikan berbasis komunitas dapat melibatkan masyarakat setempat dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Misalnya, mengadakan kelas keliling atau sekolah alam yang dapat menjangkau anak-anak yang tidak terjangkau oleh sekolah formal. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada infrastruktur fisik, yang sering kali menjadi masalah di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Rekomendasi kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berbasis komunitas yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan anak-anak mereka. Konsep ini diperkuat oleh teori pendidikan berbasis partisipasi yang menganggap bahwa keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat dan keluarga.

Kontribusi Teori Baru dalam Pendidikan di Papua

Hasil temuan dalam penelitian ini juga membuka kemungkinan untuk pengembangan teori baru dalam konteks pendidikan di Papua. Salah satu teori baru yang dapat diajukan adalah teori pendidikan berbasis keberagaman sosial dan geografis (Bua, 2019), yang mengakui bahwa setiap daerah memiliki tantangan unik dalam memberikan akses pendidikan yang setara. Teori ini berfokus pada adaptasi kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel, yang tidak hanya mempertimbangkan faktor akademik, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan geografis.

Sebagai contoh, dalam konteks Papua, pendekatan pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal dan budaya setempat sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Mengintegrasikan pendidikan berbasis budaya dengan kurikulum nasional bisa

membantu menciptakan pembelajaran yang lebih relevan dan menarik bagi siswa di daerah-daerah terpencil.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Alfianti (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis kebudayaan dapat meningkatkan kesadaran budaya di kalangan siswa dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks Papua, ini berarti mengajarkan siswa tentang budaya, sejarah, dan bahasa lokal mereka dalam rangka menciptakan rasa bangga dan identitas diri yang kuat, yang dapat memperkuat semangat mereka untuk bersekolah dan mengejar pendidikan.

Melalui memperkenalkan teori pendidikan berbasis keberagaman sosial dan geografis ini, diharapkan pendidikan di Papua dapat lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta mampu menjawab tantangan geografis dan sosial yang ada. Hal ini akan memberikan solusi jangka panjang untuk meningkatkan partisipasi anak-anak Papua dalam pendidikan formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka anak tidak bersekolah di Papua merupakan masalah pendidikan yang mendalam dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Lebih dari 690.000 anak usia sekolah di Papua, baik di tingkat dasar, menengah, maupun lanjutan, masih tidak bersekolah, dengan sebagian besar berada di daerah terpencil dan terisolasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia.

Faktor utama penyebab tingginya angka putus sekolah di Papua antara lain aksesibilitas yang terbatas karena kondisi geografis yang sulit, infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, serta kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas. Program pendidikan berbasis komunitas, seperti Sekolah Sepanjang Hari (SSH), terbukti dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi anak-anak di pendidikan dasar. Namun, tantangan utama yang harus dihadapi adalah ketidakmerataan alokasi anggaran pendidikan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Rekomendasi kebijakan yang diajukan meliputi pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pengajar, serta pemanfaatan Dana Otsus secara lebih optimal untuk sektor pendidikan. Selain itu, kebijakan yang lebih berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan spesifik wilayah juga perlu dipertimbangkan untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi sosial budaya di Papua.

Upaya memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan di Papua tidak hanya membutuhkan kebijakan yang efektif, tetapi juga perlu didukung dengan partisipasi aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat lokal. Keberhasilan dalam mengatasi masalah pendidikan di Papua akan berkontribusi besar dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila, dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Noviani, N. (2019, July). Tantangan dan solusi dalam perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgris Palembang*.
- ALAM, F. M. D. I. P. Penerapan Sila Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat.

- Alfianti, F. NILAI KEADILAN DAN ETIKA TERHADAP STUDI KASUS PAPUA MELALUI KACAMATA PANCASILA.
- Bua, P. R., Samiyono, D., & Tampake, T. C. (2019). Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif Dari Sila Kelima Pancasila. *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, 5(2), 109-124.
- Herawati, Y. (2014). Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 18(1).
- Ismail, F. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah: Solusi Peningkatan Kcalitas Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 2(2).
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di indonesia dan solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1-13.
- Lena, A. (2024). Pancasila Sebagai Landasan Etika Dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Wawasan Nusantara*, 1(2), 34-39.
- Mbato, C. L., & Sungging, F. (2022). *Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, Dan Peran Universitas Sanata Dharma*. Sanata Dharma University Press.
- Nuranisa, D., Diva, F. W., Rosdianah, P. T., Syahrial, S., & Noviyanti, S. (2022). Strategi Guru dalam Pengembangan Nilai Praktis Sila Ke-5 Pancasila pada Pembelajaran Tematik di Kelas Rendah Sekolah Dasar 121/I Muara Singoan. *AS-SABIQUN*, 4(2), 334-345.
- Purnama, Y. H., Prasetyo, A. K. D., Christianti, A. M., Yuniarto, A., Tungga, B., Suhaepi, E., ... & Murti, Y. I. (2022). REFLEKSI NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA.
- Putri, N. (2020). *Strategi Guru dalam Pengembangan Nilai Paktis Sila Ke-5 Pancasila Pada Pembelajaran Tematik di Kelas Rendah Sekolah Dasar* (Doctoral dissertation, FKIP).
- Sumarno, M. (2018). PEMBANGUNAN PAPUA DEMI KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA DITINJAU DARI PANCASILA MENURUT SOEKARNO.
- Uno, H. H. B. (2024). *Profesi kependidikan: problema, solusi, dan reformasi pendidikan di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Wijaya, M. S., & Sulistyawati, I. (2024). PENERAPAN METODE PERMAINAN MONOPOLI PANCASILA DALAM MENANAMKAN NILAI SILA KE 5 PANCASILA PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 5389-5395.